*Vol 2 No 3, Agustus 2023, pp 228-233* https://doi.org/10.59029/js.v2i3.110

**Jurnal Masyarakat Madani Indonesia**
**e-ISSN: 2829-6702**
**https://syadani.onlinelibrary.id/**

# Pendidikan Politik Untuk Menciptakan Pemilih Perempuan Cerdas Di Kota Palangka Raya

Dian Iskandar[1*], Murniyati Yanur[1], Jhon Retai Alfri Sandi[1], Ricky Zulfauzan[1], Yunita Asmawati[1], Purnama Julia Utami[1], Anyualatha Haridison[1], Charles Hutapea[1]
[1]*Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia.*
*Corresponding author email: dianiskandar@fisip.upr.ac.id*

**INFO ARTIKEL**

*Diterima: 10 Juli 2023*
*Direvisi: 17 Juli 2023*
*Disetujui: 27 Juli 2023*

***Keywords*:**

*Pendidikan Politik, Pemilih Perempuan, Pemilih Cerdas*

**ABSTRAK**

*Semakin dekatnya pemungutan suara, menjadi memontum untuk penguatan posisi pemilih termasuk pemilih perempuan di tengah pemburuan suara oleh kontestan pemilu. Penting bagi perempuan untuk memilih tidak menggunakan kedekatan sosiologis dan psikologis dalam menentukan pilihan, namun haru srasional dalam memberikan suaranya. Maka dari itu pendidikan politik menjadi penting dilakukan agar dapat menciptakan pemilih perempuan yang cerdas, sehingga dapat berpartisipasi dan menentukan pilihan yang rasional saat hari pemungutan suara pada pemilu 2024. Dengan membekali pemilih perempuan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan dalam membuat keputusan, serta meningkatkan partisipasinya. Khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah perempuan anggota PKK Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Program pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Dalam pelaksanaan,menyampaikan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu serta cara menjadi pemilih perempuan yang cerdas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pembiasaan diri mendidik diri untuk mencari informasi untuk mengenali dan mengevaluasi kandidat, partai politik dan isu utama; terlibat dalam diskusi atau mengikuti debat politik, serta memahami proses voting dan ikut memilih pada hari pemungutan suara. Pendidikan politik yang dilakukan ini mendapatkan respon positif oleh kelompok sasaran, dan mereka berkomitmen untuk memilih pada hari pemungutan suara dan memilih secara cerdas dengan mempertimbangkan trackrecord kandidat, partai serta isu atau program utama yang ditawarkan. Adanya perubahan cara pandang dalam menentukan pilihan karena sudah memahami bahwa mereka turut memproduksi pemerintahan dan berdampak pada masa depan negara*

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*
*Copyright@ Author (2023).*

## 1. PENDAHULUAN

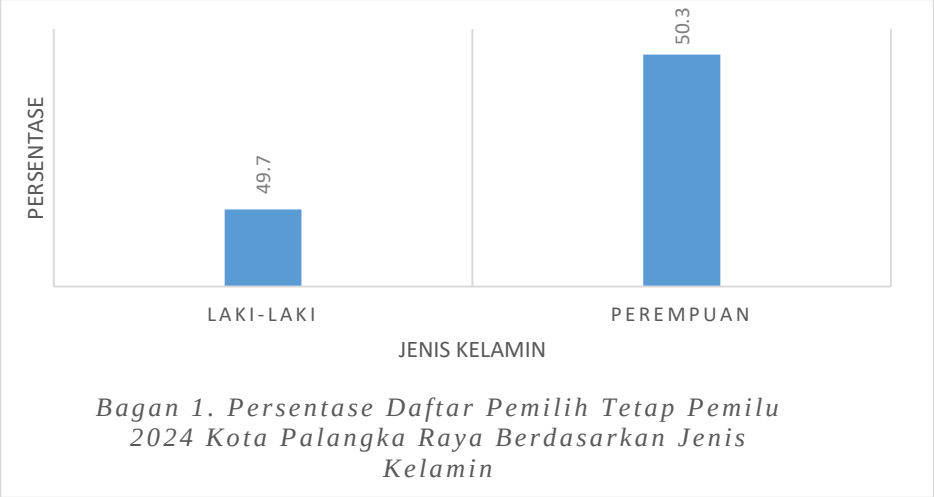
Tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (selanjutnya dibaca: Pemilu) sudah dilalui, dan hari pemungutan suara semakin dekat. Perhelatan besar demokrasi akan segera dilaksanakan pada 14 februari 2024 nanti untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif. Penyelenggara pemilu bekerja keras memastikan gawean lima tahunan ini berjalan dengan baik. Di

sisi lain, para "pemburu" kekuasaan sudah mulai bergerak menjalankan mesinnya untuk mengatur strategi agar memenangkan kontestasi ini agar mendapatkan dukungan pemilih sebagai pemegang kedaulatan. Pemilih menjadi sangat berharga saat ini, di mana pemilu menjadi sarana dan momentum bagi pemilih untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara (civic duty) dan mengalihkan kedaulatannya kepada kandidat yang dipercayai untuk menangku jabatan politik tersebut[1].

Pemilu adalah milik rakyat, dan keikutsertaan rakyat dalam pemilihan umum adalah suatu perihal yang kursial dan perlu diperhatikan dalam demokrasi elektoral ini. Tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari rakyat maka legitimasi kepemimpinan politik menjadi "busuk", lumrahnya pemilu merupakan suatu kompetisi untuk mendapatkan daulat rakyat. Shumpeter mengatakan bahwa fungsi utama pemilih untuk menghasilkan pemerintahan baik secara langsung atau melalui lembaga intermediate. Ia juga mengatakan bahwa dengan prinsip demokrasi, kendali pemerintahan harus diserahkan kepada yang mendapatkan dukungan lebih banyak [2].

Merujuk pada apa yang disampaikan Schumpeter tersebut, peran aktif rakyat dalam sangat dibutuhkan untuk menjaga jalannya penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya datang menggunakan hak suara pada saat hari pemungutan suara, namun juga mengawal proses sirkulasi elit tersebut agar nantinya dapat memproduksi pemerintahan yang merepresentasikan kepentingan rakyat, tanpa terkecuali bagi pemilih di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan rapat pleno KPU kota Palangka Raya pada Juni 2023, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 sebanyak 211.423 pemilih dengan rincian sebagai berikut:




*Bagan 1. Persentase Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Kota Palangka Raya Berdasarkan Jenis Kelamin*

*Gambar 1 Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024*

Dari total pemilih tetap pemilih 2024 tersebut, pemilih laki laki sebanyak 104.994 orang atau 49,7 persen, dan pemilih perempuan sebanyak 106.429 atau 50,3 persen yang tersebar di 30 kelurahan pada wilayah adminstrasi Kota Palangka Raya [3]. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa perempuan memiliki bargaining position yang karena secara kuantitatif pemilih perempuan lebih banyak. Sehingga besar kemungkinan perempuan menjadi sasaran dari kandidat untuk dijaring suaranya. Oleh sebab itu perempuan sebagai pemilih harus rasional dalam menentukan pilihannya dan dibekali dengan nilai-nilai demokrasi agar tidak terpapar manuver negatif para kontestan pemilu seperti politik uang [4]–[7], ujaran kebencian [8], [9], serta mampu secara bijak menjatuhkan pilihan kepada mereka yang akan bekerja di posisi eksekutif maupun legislatif lima tahun ke depan.

Berdasarkan kondisi itulah perlu adanya kegiatan sosialisasi untuk menciptakan pemilih perempuan yang cerdas mampu bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi menciptakan pemerintahan

yang mampu menjalankan fungsi dan tugas demi mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu rakyat pada umumnya dan pemilih perempuan khususnya harus mengedukasi diri, well inform tentang kandidat, partai, dan isu-isu yang terjadi, agar tidak tepapar isu-isu yang disetting untuk mendistribusikan ujaran kebencian dan berita palsu, serta memiliki perisai agar terhalang dari "serangan fajar" yang membeli suara mereka. Dengan demikian sangat diharapkan pemilih umumnya dan pemilih perempuan khususnya memiliki "antibody" berupa pengetahuan dan kesadaran untuk memilih secara cerdas

## 2. METODE PELAKSANAAN

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pemilih perempuan di Kota Palangka Raya tentang pentingnya berpartisipasi didalam pemilu, serta menambah wawasan perempuan untuk menggunakan suaranya, memilih kandidat dengan cara yang rasional. Untuk mencapai tujuan tersebut metode yang digunakan adalah *community development* melalui *transfer knowledge*. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap persiapan, pelaksana melakukan pengumpulan data mengenai mengenai kelompok sasaran yaitu Anggota Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Menteng, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Kelurahan Menteng dan Ketua dari Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga tersebut.
2. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan utama dalam kegiatan pengabdian. Dalam tahap ini pelaksana mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan suaranya untuk memilih secara rasional dan cerdas.
3. Tahap evaluasi, dilakukan pada level reaksi, dimana tim pengabdi mengamati reaksi dari kelompok sasaran ketika proses transfer knowledge dilaksanakan.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak positif sehingga membuat perempuan lebih aware dan melek terhadap politik. apalagi pada masa pre-election ini. Artinya nilai, sikap serta perilaku politiknya adalah pilihan sadar dan merupakan hasil olah pikirnya yang kritis (rasional). Pendidikan politik ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara, karena perempuan sebagai pemilik suara harus memilih dengan cerdas dan bijaksana dalam memberikan suara mereka pada hari pemungutan suara. Kegiatan ini juga memberikan dorongan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik, setidaknya menggunakan hak memilih pada saat hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

### 3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Pendidikan politik yang telah dilaksanakan menggunakan metode community development yang terfokus pada transfer pengetahuan, di mana bentuk kegiatan berupa sosialisasi. Kegiatan ini dihadiri oleh perempuan anggota PKK sekaligus Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya yang merupakan kelompok sasaran. Sebagaimana misi dari pendidikan politik yang diselenggarakan untuk menciptakan masyarakat khusunya pemilih yang cerdas, serta pemilih yang turut berpartisipasi dalam voting, maka materi yang disampaikan mengenai esensi mengapa harus turut memilih dan cara

menjadi pemilih cerdas.



*Gambar 2 Bukti limbah di desa hasil observasi*

Penekanan disampaikan kepada pemilih perempuan mengenai pentingnya berpartisipasi pada pemilu karena bentung tanggungjawab dan hak sebagai warga negara untuk turut memproduksi pemerintahan serta menjaga nilai-nilai nilai demokrasi dan juga dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Selain itu, juga men-deliver terkait cara-cara menjadi pemilih cerdas. Hal ini dilakukan agar pemilih perempuan menjadi lebih rasional, bukan memilih karena marketing politik yang dilakukan melalui iklan politik yang sudah ter-framing dan disetting, bukan juga karena kedekatan sosiologis dan psikologis dan money politic, melainkan memilih secara rasional dengan mempertimbangkan beberapa hal.

Menjadi pemilih cerdas terdapat beberapa cara, yaitu: 1) Mendidik diri sendiri untuk membiasakan diri memahami kandidat, partai politik dan juga isu yang diangkat. 2) Memperkaya sumber informasi untuk mendapatkan berbagai prespektif serta memeriksa validitas informasi agar terhindar dari berita palsu. 3) Memahami nilai dan prioritas diri sesuai dengan kepentingan, agar menjadi bahan evaluasi terhadap kandidat, partai politik dan isu, dan tidak terjerat pada lingkaran setan politik uang. 4) Terlibat secara aktif maupun pasif dalam diskusi politik dan debat kandidat. 5) Memahami proses pemungutan suara dan turut memilih pada hari pelaksanaan pemungutan suara.

Penekanan pada perkara tersebut dilakukan atas dasar pendidikan politik yang memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan dan mempromosikan demokrasi yang sehat. Mengutip yang disampaikan oleh Campbell, D. E., & Niemi, R. G. (2018), Kegiatan yang dilakukan memberikan keuntungan seperti peningkatan partisipasi politik karena membekali individu dengan pemahaman tentang proses dan peran pemilih sebagai pemegang mandat, serta mendorong pemilih untuk memiliki pemikiran kritis sehingga akan mngevaluasi prespektif yang berbeda, kemudian juga membantu memahami hak dan tanggungjawab sebagai individu sekaligus pemilih maupun warga negara [10].

### 3.2 Evaluasi Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan mendapatkan respon positif dari kelompok sasaran, dan mereka mereka menyambut baik informasi yang disampaikan mengenai cara menjadi pemilih perempuan yang cerdas, hal ini dilihat dari level reaksi yang diberikan oleh sasaran kegiatan pengabdian ini dalam sosialisasi maupun diskusi interaktif yang dilakukan. Selain itu, peserta juga mendeklarasikan untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti.



*Gambar 3 Diskusi Interaktif Bersama Peserta*

Perlu disadari bahwa kegiatan pendidikan politik merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Apalagi untuk mencapai individu yang cerdas dalam memilih, membutuhkan pembelajaran dan keterlibatan atau partisipasi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan secara mandiri dengan mendapatkan informasi, menganalisi informasi secara kritis dan berpartispasi aktif dalam proses demokrasi, sehingga dapat membuat keputusan yang terinformasi dengan baik saat memberikan suara. Pemilih Perempuan khususnya dan warga negara umumnya harus menyadari bahwa memilih dan dipilih adalah hak dan tanggungjawab, karena ini akan berdampak pada bagaimana tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan serta berujung pada penentuan masa depan bangsa dan negara.

## 4. KESIMPULAN

Kegiatan pendidikan politik yang sudah dilakukan kepada kelompok perempuan anggota Pemberdayaan Kesejahteran Keluarga (PKK) Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilu, serta cara menjadi pemilih cerdas, mendapatkan respon baik dan informasi yang diberikan diterima oleh seluruh anggota dari kelompok sasaran tersebut. Selain itu, peserta juga menyampaikan komitmen untuk ikut berpartisipasi secara pasif supportive melalui keikutsertaan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 nanti, serta memilih secara cerdas dengan mempertimbangkan trackrecord kandidat dan partai serta isu atau program utama, bukan lagi karena rasa kedekatan secara psikologis maupun sosiologis. Perubahan cara dalam membuat keputusan dalam menentukan pilihan karena sudah menyadari bahwa berpatisipasi dalam pemilu secara regular dan memilih secara cerdas merupakan bentuk tanggungjawab dan hak sebagai warga negara untuk menciptakan atau memproduksi pemerintahan, karena akan berdampak bagi masa depan negara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada FISIP Universitas Palangka Raya atas pendanaan penulisan artikel ini, dan kepada kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya yang telah bersedia menjadi mitra dan membantu dalam kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Iskandar and N. Marlina, “Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Boyolali,” *J. Pengabdi. Vokasi*, vol.

01, no. 01, pp. 12–18, 2019, [Online]. Available: https://core.ac.uk/download/pdf/234034293.pdf.
[2] J. A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*. 2017.
[3] T. Priscilla, "Pleno KPU Tetapkan 211.423 Masuk DPT Pemilu Kota Palangka Raya," *https://www.borneonews.co.id/*, 2023.
[4] E. Aspinall, "Elections and the normalization of politics in Indonesia," *South East Asia Res.*, vol. 13, no. 2, pp. 117–156, 2005, doi: https://doi.org/10.5367/0000000054604515
[5] M. F. Aminuddin and N. H. Attamimi, "From Retail to Grocery: Money Politics in 2014 Indonesian Legislative Election," *Polit. Indones. Indones. Polit. Sci. Rev.*, vol. 4, no. 1, pp. 99–120, 2019, doi: https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.12609
[6] E. Rhoads, "Women's Political Participation in Indonesia: Decentralisation, Money Politics and Collective Memory in Bali," *J. Curr. Southeast Asian Aff.*, vol. 31, no. 2, pp. 35–56, 2012, doi: https://doi.org/10.1177/186810341203100202
[7] B. Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *J. Antikorupsi INTEGRITAS*, vol. 5, no. 1, pp. 55–74, 2019, [Online]. Available: https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413
[8] L. Astrika and Y. Yuwanto, "Ujaran Kebencian dan Hoaks: Signifikasinya terhadap Pemilih Pemula di Kota Semarang," *J. Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 4, no. 2, p. 107, 2019, doi: https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5433
[9] N. Musyafak and A. H. A. Ulama'i, "Narasi Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)," *J. Ilmu Dakwah*, vol. 39, no. 2, p. 166, 2019, doi: https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4673
[10] R. G. Campbell, D. E., & Niemi, "Educating the democratic citizen: The importance of political science and a liberal education," *Perspect. Polit.*, vol. 16, no. 3, pp. 724–740, 2018